

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis konflik bantuan sosial pada masyarakat Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan peta konflik yang ada di Kelurahan Teluk. Bersumber dari tidak meratanya bantuan sosial di Teluk mengakibatkan timbulnya beberapa konflik antara lain yang pertama, pemotongan penerimaan bansos dengan motif untuk membagikan kepada warga yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan bansos. Terdapat warga yang melapor ke kelurahan sehingga dari pihak kelurahan memberikan saran kepada ketua/kader PKH di wilayah tersebut agar musyawarah dengan anggotanya terkait hal tersebut.

Temuan yang kedua ialah pemotongan admin di agen pengambilan bansos, yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman warga tentang mekanisme penyaluran bansos. Isu ini masih ada hingga saat ini. Temuan yang ketiga yaitu banyak bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran. Pada saat ini masih terdapat isu yang sama dikarenakan banyak faktor. Untuk konflik yang keempat tidak adanya transparansi dari pemerintah, yang bermula dari warga tidak mengetahui dan tidak diberitahu mengenai asal dari data penerima bansos pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kelurahan Teluk dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas telah menjelaskan bahwa data dari BPS tahun 2011-2012 yang bersifat makro. Sedangkan data mikro terdapat pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*) yang dapat diakses oleh desa/kelurahan masing-masing dan desa/kelurahan yang mempunyai kewajiban untuk meng-update data warganya yang ekonominya sudah berubah.

2. Berdasarkan penelitian untuk penanganan konflik bansos yang terjadi di Kelurahan Teluk, dari upaya masyarakat dan pemerintah sendiri untuk menyelesaikan konflik tersebut. Untuk isu yang pertama terdapat upaya warga yang melapor ke kelurahan sehingga dari pihak kelurahan memberikan saran kepada ketua/kader PKH di wilayah tersebut agar musyawarah dengan anggotanya terkait hal tersebut, dengan hasil pemotongan tersebut sudah tidak ada. Terkait isu yang kedua yang masih ada hingga

sekarang dengan memberikan edukasi ke setiap kelompokarganya melalui kader terkait mekanisme penyaluran bansos, sehingga warga dapat memilih untuk mengambil bansos dengan cara yang tidak merugikan mereka.

Penanganan untuk isu yang ke tiga yang juga masih ada hingga sekarang, hal ini dapat ditanggulangi menggunakan sistem *button up* diterapkan pada setiap RT di kelurahan Teluk. Yaitu dengan cara dari RT meninjau secara berkala warganya yang mungkin membutuhkan bansos dan warganya yang sudah tidak layak mendapatkan bansos, untuk dilaporkan ke kelurahan untuk di update di di DTKS dan SIKS-NG. Serta untuk Pemerintah Kelurahan Teluk, agar rutin untuk meng-*update* data warganya di aplikasi DTKS dan SIKS-NG agar mengurangi tingkat ketidakmerataan penyaluran bansos di Kelurahan Teluk. Adapun penjelasan dari ini pemerintah Kelurahan Teluk dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas terkait data masyarakat penerima bansos bahwa data awal penerima bansos ialah data dari BPS tahun 2011-2012 yang bersifat makro.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka di bawah ini akan diajukan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh beberapa pihak mengenai permasalahan pada penyaluran bantuan sosial.

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Teluk diharapkan kesadaran mengenai manfaat bantuan sosial yang diberikan pemerintah, agar menyadari bantuan sosial ini disalurkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, baiknya masyarakat yang sekiranya sudah mampu agar dengan sadar mengajukan diri untuk dihapus dari data penerima bantuan sosial. Untuk masyarakat yang sekiranya layak untuk mendapatkan bantuan sosial, diharapkan tidak putus asa untuk mengusulkan kepada pemerintah.
2. Bagi pemerintah kelurahan teluk selaku pihak penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat, diharapkan rutin untuk mengupdate data masyarakatnya. Menyalurkan informasi dengan lebih efektif lagi, serta menghimbau para kepala RT agar rutin memperhatikan warganya terkait pengusulan dan penghapusan nama warga di bantuan sosial. Sehingga diharapkan kedepannya bantuan sosial yang tersalurkan akan lebih merata.